

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen and Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai hubungan antara agen (manajemen usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Pada hubungan keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberi wewenang kepada *Agent* untuk membuat keputusan terbaik bagi *principal*.

Selain itu, Jensen dan Meckling (1976) mencoba menjelaskan adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal. Jika hubungan antara agen dan prinsipal adalah memaksimalkan utilitas, ada alasan untuk percaya bahwa agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi prinsipal. Prinsipal dapat membatasi divergensi dari minatnya dengan membentuk insentif yang tepat untuk agen dan membuat biaya monitoring yang dirancang untuk membatasi kegiatan menyimpang yang dilakukan oleh agen.

Menurut Elqorni (2009) dalam Wijayanti (2011) teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan tersebut masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri.

Menurut Sari (2011) berdasarkan teori keagenan, laporan perusahaan dibuat oleh pihak manajemen sebagai bentuk pertanggung jawaban mereka kepada pemilik perusahaan yang bertindak sebagai prinsipal. Dalam kedudukannya sebagai pihak yang memiliki informasi dan terlibat secara langsung dalam aktivitas perusahaan di dalamnya, manajemen memiliki intensif untuk melaporkan segala sesuatu yang dapat memaksimalkan utilitas dirinya. Cara yang paling sering dilakukan adalah dengan merekayasa laba (*earning*) perusahaan tersebut yang mana akan menjadi fokus utama pihak eksternal sesuai dengan motivasi yang melatar belakanginya.

Kesimpulan dari teori agensi ini adalah teori yang mencoba menjabarkan hubungan antara prinsipal dan agen, dimana terdapat penyerahan otorisasi dari pemilik kepada agen untuk menjalankan aktivitas perusahaan.

2.1.2 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Signalling Theory dan *asymmetric informations* digagas pertama kali oleh Akerlof, Spence dan Stiglitz yang menjadikan mereka memperoleh Nobel Ekonomi pada tahun 2001. *Signalling theory* dikembangkan dalam ilmu ekonomi dan keuangan yang menggunakan informasi yang asimetris antara perusahaan

dengan pihak luar karena manajemen lebih banyak tahu tentang prospek perusahaan dan peluang masa depan dibandingkan pihak luar (investor) (Dwiyanti, 2010).

Signalling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain (Savitri, 2010).

Menurut Wolk *et al.* (2001) dalam Jama'an (2008) *signalling theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetri informasi (*Asymmetri Information*) antara perusahaan dan pihak luar. Perusahaan (*agent*) mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang.

2.1.3 Laporan Keuangan

Rachmawati (2008) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis di pasar modal. Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul-skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan menjadi berguna bagi pemakai laporan keuangan.

Terdapat empat karakteristik pokok laporan keuangan yaitu (IAI, 2007 dalam Dwiyanti, 2010):

1. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang dapat ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk dapat segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas dan bisnis akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan

yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, membantu mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithfull representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika keabsahan dan jumlah tuntutan atas kerugian dalam suatu tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca, meskipun tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut.

4. Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan

keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan secara relatif.

2.1.4 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Menurut McGee (2007) dalam Sulistyio (2010) salah satu cara untuk mengukur transparansi dan kualitas penyampaian laporan keuangan adalah ketepatan waktu. Rentang waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan diumumkan ke publik berhubungan dengan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan.

Menurut Baridwan (2004) dalam Permana (2012) tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansi, tetapi relevansi informasi tidak dimungkinkan tanpa ketepatan waktu. Informasi mengenai kondisi dan posisi perusahaan harus secara cepat dan tepat waktu sampai ke pemakai laporan keuangan.

Ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 mengenai pasar modal. Undang-undang ini menyatakan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib mempublikasikan laporan keuangan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan kepada masyarakat. Berdasarkan lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-431/BL/2012 yang menjelaskan mengenai kewajiban Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan

kepada Bapepam dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

2.1.5 Corporate Governance

Menurut Agoes (2006) tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata perusahaan (*corporate governance*) yang baik juga disebut sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

Pengertian menurut Monks (2003) dalam Kaihatu (2006) *Good corporate governance (GCG)* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. *Corporate governance* berusaha untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan oleh para manajer dan dewan direksi difokuskan pada penciptaan nilai bagi *stakeholders* melalui penggunaan modal tangkas (Nahapiet dan Ghoshal, 1998 dalam Sari, 2011).

Laporan keuangan yang disampaikan secara tepat waktu merupakan bagian dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*), jika pelaporan keuangan suatu perusahaan disampaikan tepat waktu bisa dikatakan perusahaan tersebut telah mempunyai tata kelola perusahaan yang baik (Wibowo, 2010).

Menurut *National Committee on Governance (NCG)* dalam Agoes dan Ardana (2013), terdapat lima prinsip dasar dari *good corporate governance* yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan materiil dan relevan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

2.1.6 Ukuran Dewan Komisaris

Komisaris adalah wakil *shareholder* dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Mulyadi, 2002).

Jumlah anggota dewan komisaris yang tepat juga tergantung dari jenis keahlian yang dimiliki dari suatu industri. Kemampuan dewan komisaris dalam mengawasi dan mengatasi masalah yang muncul sangat diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan anggota dewan komisaris yang benar-benar memiliki keahlian dalam bidangnya. Sehingga jumlah anggota dewan komisaris ditentukan oleh jumlah jenis keahlian yang diperlukan dalam suatu industri (Indrayati, 2010).

2.1.7 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi. Pada perusahaan tertentu untuk memotivasi kinerja manajer, mulai menerapkan strategi atau kebijakan kepemilikan manajerial. Manajer diperlakukan bukan semata sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperlakukan sebagai pemegang saham (Rianti, 2014).

Kepemilikan perusahaan sangat penting karena terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Hal ini dapat dicontohkan dengan kepemilikan oleh manajer yang akan ikut menentukan kebijakan dan pengambil keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Dengan demikian, perusahaan dengan proporsi kepemilikan manajerial yang besar cenderung tepat waktu dalam penyajian laporan keuangannya (Savitri, 2010).

Jensen dan Meckling (1976) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham.

2.1.8 Kualitas Audit

Menurut Mulyadi (2002) laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam merupakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Auditor yang berkualitas tinggi harus memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kantor akuntan publik sendiri memiliki arti suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Standar umum pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Standar umum yang kedua mengatur sikap mental independen auditor dalam tugasnya. Standar umum yang ketiga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama

Menurut Sulistyio (2010) suatu laporan keuangan atau informasi akan kinerja perusahaan harus dapat disajikan dengan akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, perusahaan kemudian menggunakan jasa kantor akuntan publik (KAP) untuk melaksanakan pekerjaan audit terhadap laporan keuangan perusahaan.

Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan itu, perusahaan menggunakan jasa kantor akuntan publik yang mempunyai reputasi atau nama baik. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm (Big 4)*.

Toding dan Made (2013) menyebutkan bahwa reputasi kantor akuntan publik berkaitan dengan kantor-kantor penyedia jasa audit eksternal yang berafiliasi dengan KAP *Big Four*. KAP yang berafiliasi antara lain:

1. KAP *Price Waterhouse Coopers* berafiliasi dengan KAP Haryanto Sahari dan rekan dan pada tahun 2010 berubah menjadi KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
2. KAP KPMG (*Klynveld Peat Marwick Goerdeler*) berafiliasi dengan KAP Siddharta-Siddharta dan Widjaja.
3. KAP *Ernst and Young* berafiliasi dengan KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja. Pada tahun 2010 berubah nama menjadi KAP Purwantono, Suherman & Surja.
4. KAP *Deloitte Touche Thomatsu* berafiliasi dengan KAP Osman Bing Satrio dan rekan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya dan berkaitan serta menjadi acuan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2010), yang berjudul Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Studi pada Perusahaan Manufaktur di BEI. Pada penelitian ini menggunakan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan kualitas audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan sebagai variabelnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan intitusional tidak

berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan keuangan, sedangkan variabel yang lainnya yaitu komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari (2011), yang berjudul Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Perusahaan di Internet (*Corporate Internet Reporting Timeliness*). Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu Corporate Governance dan karakteristik perusahaan, dimana pada *corporate Governance* meliputi struktur kepemilikan dan ukuran dewan komisaris sedangkan karakteristik perusahaan meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, dan umur terdaftar perusahaan sebagai variabelnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif likuiditas terhadap ketepatan waktu CIR. Akan tetapi variabel lain seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, likuiditas, ukuran dewan komisaris, dan umur terdaftar perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu CIR.
3. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ibadin, Famous, dan Peter (2012), yang berjudul *The Association Between Selected Corporate Governance Attributes, Company Attributes and Timeliness of Financial Reporting in Nigeria*. Dalam penelitian ini menggunakan *board independence*, *board size*, *company size*, *profitability*, *leverage*, *audit firm size*, dan *audit delay* sebagai variabelnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang

berpengaruh terhadap *timeliness of financial reporting* hanya *audit delay* saja sedangkan *board independence*, *board size*, *company size*, *profitability*, *leverage*, dan *audit firm size* tidak berpengaruh terhadap *timeliness of financial reporting*.

4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh McGee dan Xiaoli (2012), yang berjudul *Corporate Governance and the Timeliness of Financial Reporting: A Comparative Study of the People's Republic of China, the USA and the European Union*. Dalam penelitian ini McGee dan Xiaoli ingin membuktikan apakah perusahaan di Cina telah menaati UU Sekuritas China dan Peraturan yang mewajibkan perusahaan di Cina untuk melaporkan laporan keuangannya dengan tepat waktu yaitu 4 bulan setelah akhir tahun, dan untuk membandingkan ketepatan waktu pelaporan keuangan di Republik Rakyat Cina dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan yang ada di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan di Cina lebih lambat / lama dalam melaporkan laporan keuangannya dibandingkan perusahaan yang ada di Amerika Serikat dan Uni Eropa.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Toding dan Made (2013) yang berjudul *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), kepemilikan manajerial, dan komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage*, kepemilikan manajerial dan komite

audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Profitabilitas dan reputasi kantor akuntan publik berpengaruh negatif pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif pada ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan Keuangan

Jumlah anggota dewan komisaris yang tepat juga tergantung dari jenis keahlian yang dimiliki dari suatu industri. Kemampuan dewan komisaris dalam mengawasi dan mengatasi masalah yang muncul sangat diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan anggota dewan komisaris yang benar-benar memiliki keahlian dalam bidangnya. Sehingga jumlah anggota dewan komisaris ditentukan oleh jumlah jenis keahlian yang diperlukan dalam suatu industri (Indrayati, 2010). Perusahaan yang memiliki dewan komisaris dengan ukuran yang lebih besar dan memiliki keahlian dan pengalaman yang baik dalam bidangnya, akan lebih profesional dan fokus dalam pekerjaannya sehingga cenderung lebih cepat dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya pada publik.

Hasil penelitian oleh Ezat & El-Masry (2008), menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang lebih besar, tingginya tingkat likuiditas, tingginya proporsi komisaris independen, banyaknya direksi dan *free float* tinggi mengungkapkan informasi lebih tepat waktu pada situs Web mereka. Variabel ukuran dewan komisaris (*board size*) dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap

ketepatan waktu *corporate internet reporting (CIR)*, yang memiliki arti bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh penting terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Hasil yang bertentangan oleh Syahidah (2009) yaitu peranan dewan komisaris menunjukkan tidak adanya pengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Hal ini menyatakan bahwa peranan dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh atas pengungkapan laporan keuangan, karena semakin banyak dewan komisaris berada dalam suatu perusahaan maka peranannya akan semakin menurun.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan Keuangan

Jensen dan Meckling (1976) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham.

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Jadi, manajer akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan karena adanya rasa memiliki perusahaan, sehingga akan mempengaruhi kinerja pihak manajemen menjadi semakin baik. Selain itu, kepemilikan oleh manajer akan

mendorong mereka meningkatkan usaha-usaha untuk menghasilkan laba yang optimal. Manajer dengan kinerja yang baik akan mampu menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Ukago, 2004).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh positif terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kepemilikan saham manajerial yang lebih besar akan menjadikan *timeliness* yang semakin pendek. Namun hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Toding dan Made (2013) yang membuktikan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.3.3 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

KAP besar akan memiliki hasil kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan KAP kecil. Dengan demikian ada kepentingan besar bagi para manajer untuk menyampaikan hasil audit tersebut secepatnya secara tepat waktu. Tentu saja kantor akuntan publik besar juga menekan pihak manajemen untuk menyediakan data yang diperlukan secepatnya (Fitriani, 2010). Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang memakai jasa KAP besar (*big 4*) cenderung tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya.

Hasil penelitian Sulistyono (2010) menunjukkan bahwa reputasi kantor akuntan publik atau kualitas auditor berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Artinya, perusahaan yang memakai jasa kantor akuntan publik besar atau *big 4*, cenderung lebih tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memakai jasa kantor akuntan publik besar atau *big 4*.

Sedangkan hasil penelitian berbeda disampaikan Marathani (2013) bahwa tidak adanya pengaruh antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* ataupun *Non Big four* akan terlambat untuk menyampaikan laporan keuangan perusahaan, karena kualitas auditor akan tetap terjaga sesuai dengan kode etik profesi tanpa melihat adanya pengaruh *image* KAP besar maupun kecil.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : Kualitas audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan

2.4 Model Penelitian

Berdasarkan beberapa telaah teoritis yang berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan maka kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:

